

ANALISIS EKONOMI-POLITIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SLEMAN DAN BANTUL TAHUN 2004 DAN 2005

*Mufidhatul Khasanah*¹

ABSTRACT

The Local's Autonomy per January 1, 2001 has gave a bigger role to the local government to handle the development in the local area includes within managing the local's finance (ABPD) to be more autonomus. The development program as an substance of the expenditure post in APBD needs revenue post and expense post in APBD. The successful estimating of the development program which has been approaching by the local government could be done some of them by the activity analysis of the local government within managing the local's finance by doing the financial analysis ratio of the APBD which has been settled and done.

This research will analyze the politics-economy of the regencies of Sleman and Bantul's APBD which based on the activity of both regencies within managing the local's finance by doing some financial ratio analysist to both regencies' APBD. That analysist used RKKD (Ratio Analysist of The Autonomous Local's Finance) and RK (Ratio Analysist of Compatible) which covers RBR (Ratio Analysist of Routines Expenditure) and RPB (Analysist Ratio of Development's

Expenditure). Both were related with Pilkada event as a political event, which is May 2005 for Bantul regency's Pilkada and Juny 2005 fpr Sleman Regency's Pilkada.

Keywords: The Local's Autonomy, RKKD, RK, RBR, RBP, Pilkada.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Otonomi da-erah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah. Tuntutan otonomi daerah muncul untuk merespon kesen-jangan pembangunan antarwilayah –Jawa dan luar Jawa serta Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang diakibatkan ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang berpengaruh dalam pertumbuhan antarwilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan *moment* yang tepat untuk mem-beri peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah.

¹ Dra. Mufidhatul Khasanah, M.Si., adalah Dosen Tetap Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Wangsa Manggala, Yogyakarta

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli da-erah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pa-jak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Dana perimbangan sebagai salah satu sumber pem-biaya-an daerah tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman daerah pun belum bisa diha-rapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah karena pelaksanaan pinjaman daerah ditunda. Oleh karena itu, tepatlah kalau pemerintah daerah harus inovatif dalam menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

Kabupaten Sleman dan Bantul yang terletak di Propinsi DIY perlu mengembangkan lebih lanjut sumber dana mandiri yang berasal dari PAD Kabupaten Sleman dan Bantul, yang meliputi pajak daerah, retribusi da-erah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pengembangan PAD Kabupaten Sleman dan Bantul sangat dibutuhkan bagi Kabupaten Sleman dan Bantul itu sendiri dalam rangka membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman dan Bantul secara mandiri. Pembiayaan secara mandiri tersebut diperlukan karena sangat berisiko sekali bagi Kabupaten Sleman dan Bantul apabila mengharap-kan sumber pembiayaan yang bukan bersumber pada PAD karena dana perimbangan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian

yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman da-erah pun belum bisa diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan da-erah karena pelaksanaan pinjaman daerah masih ditunda.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul mengoptimalkan berbagai program pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dan Bantul melalui APBD masing-masing kabupaten. Hasil analisis angka-angka pada item pendapatan dan belanja pada masing-masing APBD Kabupaten Sleman dan Bantul (analisis rasio keuangan APBD) akan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul dan *stakeholders* masing-masing kabupaten dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankannya. Analisis rasio keuangan terhadap APBD Kabupaten Sleman dan Bantul dilakukan terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) serta Rasio Keserasian (RK) yang meliputi Analisis Rasio Belanja Rutin (RBR) dan Analisis Rasio Belanja Pembangunan (RBP)

Penelitian ini menggunakan data APBD tahun 2004 dan 2005 karena kedua tahun tersebut sangat dekat dengan *event* pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal) di Kabupaten Sleman dan Bantul pasca pemberlakuan UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004, semua daerah yang akan menyelenggarakan pergantian pimpinan (kepala daerah) maka pergantiannya akan diselenggarakan melalui Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkadal) yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bupati Sleman dan Bantul sebagai salah satu calon yang mengikuti Pilkadal di Sleman dan Bantul pada tahun 2005, merupakan calon *incumbent* yang tentunya lebih memungkinkan melakukan “pengenalan dini” kepada masyarakat Sleman dan Bantul melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang Masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan proporsi dalam analisis rasio keuangan RKKD Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005?
2. Apakah ada perbedaan proporsi dalam analisis rasio keserasian RBR dan RBP Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perbedaan proporsi dalam analisis rasio keuangan RKKD Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005?
2. Perbedaan proporsi dalam analisis rasio keserasian RBR dan RBP Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005?

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan dalam mengembangkan materi mata kuliah ekonomi pembangunan pengantar dan keuangan daerah (dari segi teori).
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (dari segi praktik).
3. Sebagai sumbangan referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih luas dan rinci

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah:

1. H1: Diduga ada perbedaan proporsi dalam analisis rasio keuangan RKKD Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005.
2. H2: Diduga ada perbedaan proporsi dalam analisis rasio keserasian RBR dan RBP Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005.

Metode Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan informasi tentang APBD Kabupaten Sleman dan Bantul. Informasi ini bersifat umum guna memberikan data yang mencakup:

- a) Evaluasi siklus perencanaan sebelumnya;
- b) Kinerja proyek-proyek sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Sleman dan Bantul, dan bila memungkinkan mengumpulkan dari kabupaten-kabupaten yang lain;
- c) Penaksiran sumberdaya-sumberdaya dari daerah lain yang secara potensial dapat dikembangkan menjadi sumber PAD;
- d) Karakteristik dan dinamika Kabupaten Sleman dan Bantul, khususnya data perekonomian, infra-struktur, karakteristik sosial, sumberdaya dan institusi, dan sebagainya;
- e) Hubungan antara Kabupaten Sleman dan Bantul dengan pemerintah pusat dan Propinsi DIY serta kabupaten yang lain.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Kabupaten Sleman dan Bantul Propinsi DIY. Data sekunder berupa APBD. Metode sampling yang akan digunakan untuk mengumpulkan data sedapat mungkin metode sampling probabilistik. Apabila pada jenis data tertentu tidak memungkinkan di-lakukan pengam-bilan sampel secara non probabilistik, mi-salnya data PDRB, kontribusi PAD terhadap PDRB, pertumbuhan investasi, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi
Mempelajari beberapa dokumen dan naskah dari instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi kepustakaan
Penelitian ini ditunjang dengan studi *library research*, yaitu mempelajari buku-buku serta sumber lain seperti artikel, literatur, jurnal, dan situs internet dalam usaha mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif dan inferens. Data akan disajikan dalam tabel-tabel dan diagram. Data akan diolah se-suai dengan formula ukuran tendensi sentral. Semua pengolahan data akan diproses dengan program komputer.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji beda dua proporsi (uji Z). Menurut Subiyakto (1994: 122), teknik analisis secara runtut ditunjukkan dalam langkah-langkah pengujian berikut ini:

i. Menentukan hipotesis

$$H_0: p_1 = p_2$$

$$H_A: p_1 \neq p_2$$

p_1 : RKKD/RBR/RBP Kabupaten Sleman Propinsi DIY

p_2 : RKKD/RBR/RBP Kabupaten Bantul Propinsi DIY

ii. Menentukan nilai kritis

Ditetapkan tingkat signifikansi 5 persen, *degree of freedom* (d.f.) = $n_1 + n_2 - 2$ untuk mencari nilai z_{tabel}

iii. Menentukan nilai z_{hitung}

iv. Pengambilan keputusan

Membandingkan antara nilai z_{hitung} dengan nilai z_{tabel} . Apabila $z_{\text{hitung}} < z_{\text{tabel}}$ berada di daerah penolakan H_0 , maka keputusannya adalah menolak H_0 yang menyatakan bahwa $p_1 = p_2$ dan menerima H_A yang menyatakan bahwa $p_1 \neq p_2$. Apabila z_{hitung} berada di antara dua z_{tabel} maka keputusannya adalah menolak H_A yang menyatakan bahwa $p_1 \neq p_2$ dan menerima H_0 yang menyatakan bahwa $p_1 = p_2$.

KAJIAN TEORI

Teori Pembiayaan Pembangunan Daerah

Pendekatan pembangunan ekonomi menekankan pada proses pembentukan modal. Modal inilah yang kemudian digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan secara makro di Indonesia adalah (Mudrajad Kuncoro, 1997, hal. 215):

a. Ekspor

Sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, lalu lintas perdagangan internasional sangat berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan di

Indonesia. Seberapa besar peran tersebut dapat terlihat dari kontribusi ekspor yang sangat besar terhadap devisa Indonesia.

b. Bantuan Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA)

Di masa awal orde baru, para penentu kebijakan menghadapi kelangkaan modal dan sumber pembiayaan pembangunan. Tabungan domestik waktu itu begitu rendah dan tidak dapat diharapkan meningkat dalam waktu singkat. Jalan keluarnya adalah pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber luar negeri, dalam bentuk bantuan luar negeri dan PMA.

c. Tabungan Domestik

Tabungan domestik diperoleh dari sektor pemerintah dan sektor masyarakat. Tabungan pemerintah yang dimaksud adalah tabungan pemerintah dalam APBN, sebagai selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Sedangkan tabungan masyarakat merupakan akumulasi dari Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Taska, dan Deposito Berjangka.

Secara mikro, sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah tak jauh berbeda. Hanya saja ruang lingkungannya yang lebih kecil, yaitu dalam skala daerah (wilayah regional). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut adalah:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain yang Sah. Namun hingga saat ini penerimaan yang berasal dari pinjaman daerah belum diijinkan oleh pemerintah pusat.

b. Partisipasi masyarakat daerah

Partisipasi ini berupa tabungan masyarakat daerah dan kegiatan investasi perusahaan.

Acuan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Beberapa acuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah UU Otonomi Daerah Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomer 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Pasal 4 PP Nomer 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; UU Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; dan penyempurna kedua UU otonomi daerah tahun 1999 tersebut adalah UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4 PP Nomer 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat.

ANALISIS DATA

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Analisis Keuangan APBD

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Penilaian dapat dilakukan dengan cara melakukan proses auditing untuk dinilai oleh profesi akuntansi untuk menegaskan sejauh mana standar akuntansi pemerintahan telah diaplikasikan dengan semestinya dan apakah pos-pos laporan keuangan tersebut telah memenuhi standar kewajaran yang berlaku bagi operasi sebuah pemerintahan daerah. Selain dilakukan proses auditing terhadap laporan keuangan juga dapat dilakukan proses analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Hasil analisis rasio keuangan APBD suatu daerah dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam:

- a. menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah.
- d. mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. melihat pertumbuhan/pekerjaan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Hasil analisis rasio keuangan APBD suatu daerah dapat disampaikan kepada:

- a. DPRD sebagai wakil rakyat.
- b. Eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya.
- c. Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Calon kreditor yang bersedia memberikan pinjaman atau pembelian obligasi yang ditawarkan pemerintah daerah.
- e. Calon investor yang bersedia melakukan investasi di daerah.
- f. Rasio keuangan APBD yang dapat dikembangkan dari rasio keuangan perusahaan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD, Rasio Keserasian, Rasio Penyerapan Dana Per Triwulan, *Debt Service Coverage Ratio*, Rasio Pertumbuhan, dan Analisis Kontribusi.

Analisis terhadap APBD yang disebut dengan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan:

- a. kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- b. ketergantungan daerah terhadap sumberdana ekstern.
- c. tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- d. tingkat kesejahteraan masyarakat.

- e. menunjukkan rasio antara PAD dan Pendapatan Daerah

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}}$$

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
RKKD pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul
Tahun 2004 dan 2005

Kabupaten	2004	2005
Sleman	12,32%	13,55%
Bantul	7,70%	7,90%

Sumber: Hasil perhitungan pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul, Tahun 2004 dan 2005.

Berdasarkan Tabel 1, nampak RKKD pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul dari tahun 2004 ke 2005 mengalami peningkatan, yaitu dari 12,32% menjadi 13,55% untuk RKKD APBD Kabupaten Sleman dan 7,70% menjadi 7,90% untuk RKKD APBD Kabupaten Bantul. Peningkatan RKKD pada APBD kedua kabupaten tersebut dari tahun 2004 ke 2005 menunjukkan bahwa:

- Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul semakin mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- Ketertgantungan Kabupaten Sleman dan Bantul terhadap sumber dana ekstern semakin menurun.

- Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dan Bantul dalam pembangunan daerah semakin tinggi.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman dan Bantul semakin meningkat.

Analisis terhadap APBD yang disebut dengan Rasio Keserasian (RK) menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin (Rasio Belanja Rutin atau RBR) berarti semakin kecil persentase dana belanja investasi atau belanja pembangunan (Rasio Belanja Pembangunan atau RBP) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat, dan sebaliknya.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Hasil perhitungan Rasio Keserasian pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
RK pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul
Tahun 2004 dan 2005

Kabupaten	2004		2005	
	RBR	RBP	RBR	RBP
Sleman	24,82%	75,18%	24,03%	75,97%
Bantul	28,22%	71,78%	26,78%	73,22%

Sumber: Hasil perhitungan pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul, Tahun 2004 dan 2005.

Berdasarkan Tabel 2, nampak RBR Kabupaten Sleman dari tahun anggaran 2004 ke 2005 turun dari 24,82% menjadi 24,03% sedang RBP Kabupaten Sleman dari tahun anggaran 2004 ke 2005 naik dari 75,18% menjadi 75,97%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecilnya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti semakin besar persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Artinya, pembangunan di Kabupaten Sleman selama kurun waktu tahun 2004-2005 semakin berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman sebagai obyek pembangunan daerah. Sedangkan RBR Kabupaten Bantul dari tahun anggaran 2004 ke 2005 turun dari 28,22% menjadi 26,78% sedang RBP Kabupaten Bantul

dari tahun anggaran 2004 ke 2005 naik dari 71,78% menjadi 73,22%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecilnya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti semakin besar persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Artinya, pembangunan di Kabupaten Bantul selama kurun waktu tahun 2004-2005 semakin berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul sebagai obyek pembangunan daerah.

Analisis statistik uji beda dua proporsi terhadap RKKD, RBR, dan RBP Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini:

Tabel 3
Pengujian Statistik (Uji Beda Dua Proporsi, $\alpha=5\%$)
RKKD, RBR, dan RBP Kabupaten Sleman dan Bantul, Tahun 2004

Materi Pengujian Beda Proporsi	Z Hitung *)	Probabilitas
RKKD	-1,511	0,0654
RBR	0,545	0,2930
RBP	-0,545	0,2930

Sumber: Hasil perhitungan statistik pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul, Tahun 2004.

Catatan*) tidak signifikan.

Tabel 4
Pengujian Statistik (Uji Beda Dua Proporsi, $\alpha=5\%$)
RKKD, RBR, dan RBP Kabupaten Sleman dan Bantul, Tahun 2005

Materi Pengujian Beda Proporsi	Z _{hitung} *)	Probabilitas
RKKD	-1,301	0,0966
RBR	0,447	0,3276
RBP	-0,447	0,3276

Sumber: Hasil perhitungan statistik pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul, Tahun 2005.

Catatan*) tidak signifikan.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4, nampak bahwa RKKD pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 tidak ada perbedaan. Hal itu ditunjukkan dengan nilai $Z_{hitung} = -1,511$ (RKKD tahun 2004) dan $Z_{hitung} = -1,301$ (RKKD tahun 2005) yang berada di antara nilai Z_{tabel} (-1,96 dan 1,96) sehingga berada di daerah penerimaan H_0 . Dengan demikian, pernyataan $p_1 = p_2$ atau RKKD pada APBD Kabupaten Sleman sama dengan RKKD pada APBD Kabupaten Bantul diterima. Dengan demikian, selama tahun 2004-2005:

- a) Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kemampuan membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat Kabupaten Sleman dan Bantul yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- b) Ketergantungan Kabupaten Sleman dan Bantul terhadap sumber dana ekstern semakin menurun.
- c) Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dan Bantul dalam pembangunan daerah semakin tinggi.
- d) Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman dan Bantul semakin meningkat.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4, nampak bahwa RBR dan RBP pada APBD Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 tidak ada perbedaan. Hal itu ditunjukkan dengan nilai $Z_{hitung} = 0,545$ (RBR tahun 2004) dan $Z_{hitung} = 0,447$ (RBR tahun 2005) dan $Z_{hitung} = 0,545$ (RBP tahun 2004) dan $Z_{hitung} = -0,447$ (RBP tahun 2005) yang berada di antara nilai Z_{tabel} (-1,96 dan 1,96)

sehingga berada di daerah penerimaan H_0 . Dengan demikian, pernyataan $p_1 = p_2$ atau RBR dan RBP pada APBD Kabupaten Sleman sama dengan RBR dan RBP pada APBD Kabupaten Bantul diterima. Dengan demikian, selama tahun 2004-2005:

- a) APBD Kabupaten Sleman dan Bantul mengindikasikan kecenderungan semakin kecilnya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin dan semakin besar persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Sleman dan Bantul benar-benar semakin berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman dan Bantul sebagai obyek pembangunan daerah.
- b) Penurunan persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin dan peningkatan persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) di Kabupaten Sleman dan Bantul mengindikasikan dugaan bagaimana pengaruh Pilkada tahun 2005 di kedua kabupaten tersebut dalam alokasi belanja rutin dan pembangunan APBD.
- c) Sebagai pembanding, RBR Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 2004 ke 2005 naik dari 72,71% menjadi 75,97% sedang RBP Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 2004 ke 2005 mengalami penurunan dari 87,50% menjadi 86,51%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti semakin kecil persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi

masyarakat. Peningkatan persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin dan penurunan persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) di Kulon Progo mengindikasikan dugaan bagaimana belum berpengaruhnya Pilkada terhadap alokasi belanja rutin dan pembangunan APBD karena Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2005 belum melaksanakan Pilkada.

SIMPULAN dan SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 maka diperoleh simpulan hasil penelitian sebagai berikut:

- a) Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ada perbedaan proporsi (rasio keuangan RKKD) Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 tidak terbukti. Dengan demikian, secara signifikan tidak ada perbedaan proporsi (rasio keuangan RKKD) Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005, artinya Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul semakin mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Di samping itu, ketergantungan Kabupaten Sleman dan Bantul terhadap sumber dana ekstern semakin menurun.
- b) Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ada perbedaan proporsi dalam analisis rasio keserasian RBR dan RBP Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 tidak terbukti. Dengan demikian,

secara signifikan tidak ada perbedaan proporsi (rasio keserasian RBR dan RBP) Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005. Hal itu mengindikasikan kecenderungan semakin kecilnya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin dan semakin besar persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Secara politis, Pilkada tahun 2005 di kedua kabupaten tersebut mempengaruhi alokasi belanja rutin dan pembangunan APBD.

Saran

Saran agar hasil penelitian menjadi lebih sempurna adalah:

- a) Pemilihan APBD Kabupaten Sleman dan Bantul di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyek penelitian mempresentasikan dua kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada dengan salah satu calon Bupati adalah calon *incumbent*. Pada penelitian berikutnya, disarankan untuk menambah obyek penelitian pada APBD Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta sehingga akan menghasilkan simpulan penelitian yang lebih sempurna. Pilkada di ketiga daerah tersebut diselenggarakan pada tahun 2006.
- b) Pemilihan APBD Kabupaten Sleman dan Bantul di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada dua periode tahun anggaran, yaitu tahun 2004 dan 2005 perlu ditambah jumlah tahun anggaran. Penambahan jumlah tahun anggaran diharapkan mampu menghasilkan simpulan penelitian yang lebih sempurna karena akan menunjukkan bagaimana kecenderungan rasio keuangan RKKD, RBR, dan RBP dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba 4. Jakarta. 2002
- Asri Wening H. dan Rudy Badrudin. Analisis Deskriptif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2004-2005. *JEB STIE YKPN*. Vol. 1 (2) Juli 2007. pp. 91-104.
- Haryono Subiyakto. *Statistika Inferens*. Edisi 1. Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta. Yogyakarta. 1994.
- Lincoln Arsyad. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan: Ekonomi Daerah*. B P F E Yogyakarta. 1999.
- _____. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 4. Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta. 2002
- Mudrajad Kuncoro. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 1997.
- Mufidhatul Khasanah. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Kasus APBD Kabupaten Sleman dan Kulonprogo Tahun 2004 dan 2005. *JAM STIE YKPN*. Vol. 18 (1) April 2007. pp. 43-50.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. *Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004 dan 2005*.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. *Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2004 dan 2005*.
- Proceedings. *Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Daerah*. ISEI Yogyakarta. 1999.
- _____. "Peluang dan Tantangan Pelaku Ekonomi di Daerah Dalam Era Otonomi Daerah". *Jurnal Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha Yogyakarta*. Yogyakarta. 2002.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Penerbit Kuraiko Pratama. Bandung. 2004.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Beberapa Peraturan Pemerintah Bidang Dana Perimbangan Nomor 104, 105, 106, dan 107*. Penerbit PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta. 2001.